

HIKMAH KEPEMIMPINAN

Sila keempat dari lima sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengisyaratkan bahwa "rakyat" yang pasif, yaitu dipimpin, bukan "dikuasai", berkesinambungan dengan kedudukannya sebagai obyek penderita, dalam hal sila kelima, yaitu menderita kebaikan, berupa keadilan sosial, tentulah sesudahnya sebagai konsekuensi, rakyat menjadi aktif dan berfungsi sebagai subyek pelaku. Kita memang juga sudah mengenal partisipasi aktif rakyat sebagai subyek, sebagaimana yang terungkap oleh kata-kata : "Raja Adil, Raja disembah, Raja Lalim, Raja disanggah."

Di atas permukaan, kita akan memproses kesemuanya itu secara demokratis, sedikit banyak sesuai dengan Demokrasi Barat, walaupun kita di dalam mengetrapkan ajaran itu barangkali belum atau bahkan tidak disertai penghayatan sampai ke akar-akarnya.

Di bawah permukaan, di bawah sadar, akar-akar kebudayaan kita sendiri sudah tersuruk. Untuk memahami kembali akar-akar kebudayaan itu, kita perlu menengok latar-belakang kosmologis. Kita mulai dari kemudahan-kemudahan alami, atas faktor oceanografis dan vulkanologis, sedemikian rupa, sehingga sebagaimana yang terungkap dalam perkeliranan Ki Dalang, yaitu "subur" kang sarwa "tinandur".

Maka lahirilah ajaran ngurang-ngurangi, yang bersifat asketik, agar kita tidak larut ke kemudahan-kemudahan melulu, misalnya laku "ngalah", demi kejayaan akhir, mengabaikan yang lahir, mengutamakan yang batin, yang memuncak pada ajaran Kawula-Gusti (sebagai "jangka"/orientasi), yang pelaksanaannya berupa laku Ngawula Gusti (sebagai "jangkah"/operasi). Laku-laku itu hakekatnya ialah untuk penguasaan-diri, purba-diri, yang perolehannya dipergelarkan secara sosial sebagai gelar/predikat seseorang.

Kita lihat misalnya gelar seorang Sultan, yaitu Ng. D. S. D. I. S (=Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun, yaitu tingkatan Ngawula atau kumawula,

bersimpuh di hadapan kekuasaan-Nya, sebagai debu di Kaki-Nya), Kg. Sultan (-maka ditegakkanlah kekuatan, yaitu tekad (i'tikad) Hamengku Buwono (yaitu Syahadat, mencakup alam semesta), yang segera akan disusul dengan formula Kawula-Gusti, yaitu Abdullah, Abdurachman. Maka kelanjutannya ialah momentum kejayaan penguasaan terhadap diri-sendiri, yaitu Senopati Ing Ngalaga. Akhirnya tercapailah tingkatan Sayidin (-Penghulu Agama) Panatagama (-Penata Agama), Khalifatul-Lah).

Itulah lambang "Siti Hinggil", tanah yang ditinggikan, ajaran patriotisme, Pro-Patria, yang semula jauh dari Feodalisme. Bagaimana menerangkan hal ini? Kemudahan alami, kemakmuran rempah-rempah adalah faktor yang independent terhadap subyektivitas kita sebagai manusia. Maka ketika Belanda, dengan V.O.C nya tertarik pada kemakmuran bahan perdagangan kita, pada saat kita tidak begitu memperhatikannya, terbukti bahwa mereka dalam segala hal yang kelahiran, mengungguli kita, yang karena "ngalah" lalu benar-benar kalah ?.

Ternyata amat mahal, harga pelajaran-Nya, selama 3,5 abad, yaitu kurang menyadari bahwa faktor-faktor kemudahan alami itu tidak ditangan kita, melainkan di tangan-Nya. Kini kita telah merdeka, jadi tidaklah boleh lalai lagi, tidak membiarkan diri kita cenderung mencari kemudahan-kemudahan baik alami maupun penggantinya, yaitu tekhnologis, ekonomis, berupa ketergantungan baru, semata-mata karena konsumerisme.

Untuk itulah perlunya Kongres Kebudayaan Nasional, asal saja tidak berputar-putar di sekitar "puncak-puncak" Kebudayaan Daerah, di satu sisi dan katut ke Barat di sisi lain, sebab yang kita perlukan jauh melebihi hal itu, yaitu menemukan kembali jiwa bahari, secara lahiriah, sesuai dengan ke-Tanah-Air-an Nusantara, sedangkan secara batin, kita lanjutkan pelayaran di samudera "Ayat-ayat-Nya", dataran lautan ilmu, menggapai ilmu melaut, bukan hanya berhenti di daratan, lebih-lebih "mabuk daratan"

Damardjati Supadjar